

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Pengaruh dari Penduduk yang Memiliki/ Menguasai Telepon seluler, Angka Buta Huruf, Indeks Pembangunan Gender, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Air Minum Layak terhadap Persentase Penduduk Miskin di setiap provinsi di Pulau Jawa Tahun 2004-2023.

5.1.1 Hasil Analisis Regresi Sederhana di Provinsi DKI Jakarta

Hasil regresi sederhana dari variabel Persentase penduduk yang memiliki Telepon Seluler (KTS), Angka Buta Huruf (ABH), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Persentase Penduduk yang menggunakan Sumber Air Minum Layak (AML) di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 1 Hasil Regresi Sederhana di Provinsi DKI Jakarta

No	Variabel	Konstanta	koefisien	Uji t	R ²
1.	KTS	3.927367	0.000482	0.9621	0.055420
2.	ABH	4.012313	0.080334	0.8917	0.054439
3.	IPG	3.988220	-0.000050	0.4768	0.025470
4.	TPT	4.107677	-0.014584	0.7146	0.047522
5.	AML	3.718819	0.003169	0.4942	0.027755

Sumber: Eviews 12 (2025), Data Diolah

Hasil regresi sederhana menunjukkan bahwa kepemilikan telepon seluler memiliki konstanta sebesar 3,927367 dengan koefisien positif 0,000482. Artinya, semakin banyak penduduk yang memiliki telepon seluler cenderung diikuti dengan meningkatnya tingkat kemiskinan, namun pengaruhnya sangat kecil dan tidak signifikan karena nilai uji t sebesar 0,9621 lebih besar dari 0,05 serta nilai R² hanya 0,055420. Variabel angka buta huruf juga menunjukkan hubungan positif dengan konstanta 4,012313 dan koefisien 0,080334. Hal ini berarti peningkatan angka buta huruf dapat meningkatkan tingkat kemiskinan, tetapi pengaruhnya tetap lemah karena nilai uji t sebesar 0,8917 dan R² hanya 0,054439. Sementara itu, indeks pembangunan gender memiliki hubungan negatif dengan konstanta 3,988220 dan koefisien -0,000050, yang berarti semakin tinggi indeks pembangunan gender maka kemiskinan cenderung menurun. Namun, hubungan ini juga tidak kuat karena nilai uji t sebesar 0,4768 dan R² sebesar 0,025470 masih rendah.

Variabel tingkat pengangguran terbuka menghasilkan konstanta 4,107677 dengan koefisien negatif -0,014584. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran justru diikuti dengan penurunan kemiskinan, meskipun hal ini tidak sesuai dengan teori. Kondisi tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain yang lebih besar pengaruhnya terhadap kemiskinan. Variabel ini juga tidak signifikan karena nilai uji t sebesar 0,7146 dan R^2 hanya 0,047522. Untuk variabel sumber air minum layak, diperoleh konstanta 3,718819 dengan koefisien positif 0,003169. Artinya, peningkatan akses air minum layak justru berkaitan dengan naiknya kemiskinan, namun hubungannya tetap lemah dan tidak signifikan dengan nilai uji t sebesar 0,4942 dan R^2 sebesar 0,027755.

Jika dibandingkan antarvariabel, kepemilikan telepon seluler memiliki nilai R^2 tertinggi yaitu 0,055420, sehingga dapat dikatakan sebagai variabel yang paling dominan di Provinsi DKI Jakarta. Meski demikian, secara keseluruhan seluruh variabel belum menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap tingkat kemiskinan karena nilai uji t seluruhnya di atas 0,05 dan R^2 yang relatif rendah.

5.1.2 Hasil Analisis Regresi Sederhana di Provinsi Jawa Barat

Hasil regresi sederhana dari variabel Persentase penduduk yang memiliki Telepon Seluler (KTS), Angka Buta Huruf (ABH), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Persentase Penduduk yang menggunakan Sumber Air Minum Layak (AML) di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 2 Hasil Regresi Sederhana di Provinsi Jawa Barat

No	Variabel	Konstanta	koefisient	Uji t	R^2
1.	KTS	14.97940	-0.077370	0.0732	0.089189
2.	ABH	7.695917	3.518676	0.0000	0.042509
3.	IPG	25.13572	-0.185654	0.0000	0.760976
4.	TPT	1.217272	0.867305	0.0000	0.737886
5.	AML	16.09258	-0.097046	0.0000	0.769464

Sumber: Eviews 12 (2025), Data Diolah

Hasil analisis regresi sederhana di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa variabel kepemilikan telepon seluler memiliki konstanta sebesar 14,97940 dengan koefisien negatif -0,077370. Hal ini berarti peningkatan kepemilikan telepon seluler justru menurunkan tingkat kemiskinan, meskipun pengaruhnya masih relatif kecil

karena nilai probabilitas uji t sebesar 0,0732 sedikit di atas 0,05 dan nilai R^2 sebesar 0,089189 juga tergolong rendah. Untuk variabel angka buta huruf, diperoleh konstanta sebesar 7,695917 dengan koefisien positif 3,518676. Artinya, peningkatan angka buta huruf akan berdampak pada kenaikan tingkat kemiskinan, dan hasil ini signifikan karena nilai probabilitas uji t sebesar $0,0000 < 0,05$ meskipun nilai R^2 hanya 0,042509 sehingga kontribusinya masih kecil.

Selanjutnya, variabel indeks pembangunan gender memiliki konstanta sebesar 25,13572 dengan koefisien negatif -0,185654. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan indeks pembangunan gender akan menurunkan tingkat kemiskinan, dan pengaruhnya sangat kuat dengan nilai probabilitas uji t sebesar 0,0000 serta R^2 yang tinggi yaitu 0,760976. Variabel tingkat pengangguran terbuka memiliki konstanta sebesar 1,217272 dengan koefisien positif 0,867305. Hal ini berarti peningkatan tingkat pengangguran terbuka berdampak pada meningkatnya kemiskinan, dan pengaruhnya signifikan karena nilai probabilitas uji t sebesar 0,0000 serta nilai R^2 yang besar yaitu 0,737886.

Sementara itu, variabel persentase penduduk yang menggunakan sumber air minum layak memiliki konstanta sebesar 16,09258 dengan koefisien negatif -0,097046. Artinya, semakin banyak penduduk yang memiliki akses terhadap air minum layak maka tingkat kemiskinan cenderung menurun. Hasil ini signifikan dengan nilai probabilitas uji t sebesar 0,0000 dan nilai R^2 tertinggi yaitu 0,769464, sehingga variabel yang paling dominan dalam memengaruhi kemiskinan di provinsi ini adalah akses air minum layak.

5.1.3 Hasil Analisis Regresi Sederhana di Provinsi Jawa Tengah

Hasil regresi sederhana dari variabel Persentase penduduk yang memiliki Telepon Seluler (KTS), Angka Buta Huruf (ABH), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Persentase Penduduk yang menggunakan Sumber Air Minum Layak (AML) di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 3 Hasil Regresi Sederhana di Jawa Tengah

No	Variabel	Konstanta	koefisien	Uji t	R ²
1.	KTS	21.20055	-0.108524	0.1443	0.065385
2.	ABH	10.60752	3.625492	0.0000	0.885282
3.	IPG	39.44285	-0.289878	0.0000	0.795120
4.	TPT	-0.336679	2.457952	0.0000	0.725493
5.	AML	31.06577	-0.224784	0.8918	0.794497

Sumber: Eviews 12 (2025), Data Diolah

Hasil analisis regresi sederhana di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa variabel kepemilikan telepon seluler memiliki konstanta sebesar 21,20055 dengan koefisien negatif -0,108524. Artinya, peningkatan kepemilikan telepon seluler cenderung menurunkan tingkat kemiskinan, namun pengaruhnya tidak signifikan karena nilai probabilitas uji t sebesar 0,1443 lebih besar dari 0,05 dan nilai R² hanya 0,065385. Selanjutnya, variabel angka buta huruf memiliki konstanta sebesar 10,60752 dengan koefisien positif 3,625492. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan angka buta huruf secara signifikan meningkatkan tingkat kemiskinan, dengan probabilitas uji t sebesar 0,0000 dan nilai R² yang tinggi yaitu 0,885282, sehingga variabel ini berperan sangat besar dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan.

Variabel indeks pembangunan gender diperoleh konstanta sebesar 39,44285 dengan koefisien negatif -0,289878. Pengaruh variabel ini signifikan karena nilai probabilitas uji t sebesar 0,0000 dan R² cukup tinggi yaitu 0,795120. Sementara itu, variabel tingkat pengangguran terbuka menunjukkan konstanta sebesar -0,336679 dengan koefisien positif 2,457952. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka, maka tingkat kemiskinan juga meningkat, dengan pengaruh yang signifikan karena nilai probabilitas uji t sebesar 0,0000 dan R² sebesar 0,725493.

Sedangkan variabel akses air minum layak memiliki konstanta sebesar 31,06577 dengan koefisien negatif -0,224784. Secara teori, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan akses terhadap sumber air minum layak akan menurunkan kemiskinan. Namun, hasil ini tidak signifikan karena nilai probabilitas uji t sebesar 0,8918 jauh di atas 0,05, meskipun nilai R² relatif tinggi yaitu 0,794497. Jika dilihat dari nilai R², variabel yang paling dominan di Jawa Tengah adalah angka buta huruf dengan R² tertinggi sebesar 0,885282.

5.1.4 Hasil Analisis Regresi Sederhana di Provinsi DI Yogyakarta

Hasil regresi sederhana dari variabel Persentase penduduk yang memiliki Telepon Seluler (KTS), Angka Buta Huruf (ABH), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Persentase Penduduk yang menggunakan Sumber Air Minum Layak (AML) di Provinsi DI Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 4 Hasil Regresi Sederhana di Provinsi DI Yogyakarta

No	Variabel	Konstanta	koefisien	Uji t	R ²
1.	KTS	15.67944	-0.010734	0.8918	0.054441
2.	ABH	12.85359	3.275231	0.0000	0.679295
3.	IPG	35.10318	-0.231060	0.0000	0.720806
4.	TPT	6.477107	1.843682	0.0000	0.684385
5.	AML	28.40314	-0.178046	0.0000	0.853114

Sumber: Eviews 12 (2025), Data Diolah

Hasil analisis regresi sederhana di Provinsi DI Yogyakarta menunjukkan bahwa variabel kepemilikan telepon seluler memiliki konstanta sebesar 15,67944 dengan koefisien negatif -0,010734. Artinya, peningkatan kepemilikan telepon seluler cenderung menurunkan tingkat kemiskinan, namun pengaruhnya tidak signifikan karena nilai probabilitas uji t sebesar 0,8918 jauh di atas 0,05 dan nilai R² hanya 0,054441. Variabel angka buta huruf menunjukkan konstanta sebesar 12,85359 dengan koefisien positif 3,275231. Hal ini berarti peningkatan angka buta huruf berdampak pada naiknya tingkat kemiskinan, dan hasil ini signifikan dengan nilai probabilitas uji t sebesar 0,0000 serta nilai R² sebesar 0,679295.

Indeks pembangunan gender memiliki konstanta sebesar 35,10318 dengan koefisien negatif -0,231060. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi indeks pembangunan gender, maka tingkat kemiskinan cenderung menurun. Pengaruhnya cukup kuat dan signifikan dengan nilai probabilitas uji t sebesar 0,0000 serta R² sebesar 0,720806. Variabel tingkat pengangguran terbuka memiliki konstanta sebesar 6,477107 dengan koefisien positif 1,843682, yang berarti peningkatan pengangguran berdampak pada naiknya tingkat kemiskinan. Hasil ini juga signifikan dengan probabilitas uji t sebesar 0,0000 dan nilai R² sebesar 0,684385. Sementara itu, variabel akses air minum layak memiliki konstanta sebesar 28,40314 dengan koefisien negatif -0,178046. Hal ini berarti peningkatan akses terhadap air

minum layak dapat menurunkan tingkat kemiskinan, dan hasil ini signifikan karena nilai probabilitas uji t sebesar 0,0000 serta R^2 tertinggi yaitu 0,853114. Jika dilihat dari nilai R^2 , variabel yang paling dominan di Provinsi DI Yogyakarta adalah akses air minum layak dengan nilai R^2 sebesar 0,853114, diikuti oleh indeks pembangunan gender dan tingkat pengangguran terbuka.

5.1.5 Hasil Analisis Regresi Sederhana di Provinsi Jawa Timur

Hasil regresi sederhana dari variabel Persentase penduduk yang memiliki Telepon Seluler (KTS), Angka Buta Huruf (ABH), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Persentase Penduduk yang menggunakan Sumber Air Minum Layak (AML) di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 5 Hasil Regresi Sederhana di Provinsi Jawa Timur

No	Variabel	Konstanta	koefisien	Uji t	R^2
1.	KTS	23.84386	-0.161838	0.0127	0.259382
2.	ABH	8.377666	2.788203	0.0000	0.888830
3.	IPG	35.06149	-0.257258	0.0000	0.744018
4.	TPT	2.367792	2.170216	0.0000	0.636699
5.	AML	29.32375	-0.209324	0.0000	0.750767

Sumber: Eviews 12 (2025), Data Diolah

Hasil analisis regresi sederhana di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa variabel kepemilikan telepon seluler memiliki konstanta sebesar 23,84386 dengan koefisien negatif -0,161838. Artinya, semakin tinggi tingkat kepemilikan telepon seluler maka tingkat kemiskinan cenderung menurun. Hasil ini signifikan karena nilai probabilitas uji t sebesar 0,0127 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai R^2 sebesar 0,259382, meskipun kontribusinya tidak terlalu besar. Variabel angka buta huruf memiliki konstanta sebesar 8,377666 dengan koefisien positif 2,788203. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi angka buta huruf, maka tingkat kemiskinan semakin meningkat. Hasil ini signifikan dengan probabilitas uji t sebesar 0,0000 dan nilai R^2 yang sangat tinggi yaitu 0,888830, sehingga variabel ini memiliki pengaruh besar terhadap variasi tingkat kemiskinan.

Selanjutnya, variabel indeks pembangunan gender diperoleh konstanta sebesar 35,06149 dengan koefisien negatif -0,257258. Artinya, semakin baik pembangunan gender maka tingkat kemiskinan cenderung menurun. Hubungan ini signifikan

dengan nilai probabilitas uji t sebesar 0,0000 dan R^2 sebesar 0,744018. Variabel tingkat pengangguran terbuka memiliki konstanta sebesar 2,367792 dengan koefisien positif 2,170216. Hal ini berarti peningkatan pengangguran akan mendorong naiknya tingkat kemiskinan. Hasil ini signifikan karena nilai probabilitas uji t sebesar 0,0000 dan R^2 sebesar 0,636699. Variabel akses air minum layak menunjukkan konstanta sebesar 29,32375 dengan koefisien negatif -0,209324. Artinya, semakin banyak masyarakat yang memiliki akses air minum layak, maka tingkat kemiskinan cenderung menurun. Hasil ini signifikan dengan nilai probabilitas uji t sebesar 0,0000 serta nilai R^2 sebesar 0,750767.

Jika dilihat dari nilai R^2 , variabel yang paling dominan dalam menjelaskan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur adalah angka buta huruf dengan R^2 tertinggi sebesar 0,888830. Dengan demikian, faktor pendidikan, khususnya terkait masih tingginya angka buta huruf, menjadi aspek utama yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur.

5.1.6 Hasil Analisis Regresi Sederhana di Provinsi Banten

Hasil regresi sederhana dari variabel Persentase penduduk yang memiliki Telepon Seluler (KTS), Angka Buta Huruf (ABH), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Persentase Penduduk yang menggunakan Sumber Air Minum Layak (AML) di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 6 Hasil Regresi Sederhana di Provinsi Banten

No	Variabel	Konstanta	koefisien	Uji t	R^2
1.	KTS	10.35940	-0.056667	0.0111	0.269586
2.	ABH	5.418990	1.793279	0.0000	0.683126
3.	IPG	15.98870	-0.110055	0.0000	0.747255
4.	TPT	2.440235	2.170216	0.0000	0.810557
5.	AML	9.255170	-0.041440	0.0003	0.494303

Sumber: Eviews 12 (2025), Data Diolah

Hasil analisis regresi sederhana di Provinsi Banten menunjukkan bahwa variabel kepemilikan telepon seluler memiliki konstanta sebesar 10,35940 dengan koefisien negatif -0,056667. Hal ini berarti peningkatan kepemilikan telepon seluler berhubungan dengan penurunan tingkat kemiskinan. Hasil ini signifikan karena

nilai probabilitas uji t sebesar $0,0111 < 0,05$ dan nilai R^2 sebesar 0,269586, meskipun kontribusinya masih relatif rendah. Variabel angka buta huruf memiliki konstanta sebesar 5,418990 dengan koefisien positif 1,793279. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi angka buta huruf maka tingkat kemiskinan juga meningkat. Hasil ini signifikan karena nilai probabilitas uji t sebesar 0,0000 dengan R^2 sebesar 0,683126.

Indeks pembangunan gender memiliki konstanta sebesar 15,98870 dengan koefisien negatif -0,110055. Artinya, peningkatan indeks pembangunan gender akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hasil ini signifikan dengan probabilitas uji t sebesar 0,0000 serta nilai R^2 sebesar 0,747255. Variabel tingkat pengangguran terbuka memiliki konstanta sebesar 2,440235 dengan koefisien positif 2,170216. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka maka tingkat kemiskinan juga meningkat. Hubungan ini signifikan dengan nilai probabilitas uji t sebesar 0,0000 dan nilai R^2 tertinggi kedua yaitu 0,810557.

Sementara itu, variabel akses air minum layak memiliki konstanta sebesar 9,255170 dengan koefisien negatif -0,041440. Artinya, peningkatan akses masyarakat terhadap air minum layak dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Hasil ini signifikan dengan probabilitas uji t sebesar 0,0003 serta nilai R^2 sebesar 0,494303, meskipun pengaruhnya tidak sebesar variabel lain. Jika dilihat dari nilai R^2 , variabel yang paling dominan di Provinsi Banten adalah tingkat pengangguran terbuka dengan nilai R^2 tertinggi yaitu 0,810557.

5.2 Pengaruh Penduduk yang memiliki Telepon seluler, Angka Buta Huruf, Indeks Pembangunan Gender, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Air Minum Layak terhadap Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa Tahun 2004-2023.

5.2.1 Estimasi Regresi Berganda Data Panel

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis regresi berganda dengan data panel. Sebelum melakukan estimasi. Tiga pendekatan utama yang digunakan dalam analisis ini adalah *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM), dan *random effect model* (REM). Hasil pengujian ketiga model estimasi tersebut disajikan pada bagian berikut.

1. *Common Effect Model (CEM)*

Untuk Pengaruh variabel-variabel independen terhadap tingkat kemiskinan dianalisis melalui estimasi menggunakan model common effect. Hasil dari estimasi model common effect mengenai pengaruh variabel X yang digunakan dalam penelitian terhadap persentase penduduk miskin di Pulau Jawa digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 5. 7 Hasil Estimasi Common Effect Model (CEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	36.13393	3.597388	10.044449	0.0000
KTS?	-0.027530	0.020850	-1.320373	0.1894
ABH?	1.845235	0.352415	5.235966	0.0000
IPG?	-0.147001	0.040454	-3.633815	0.0004
TPT?	-1.038911	0.090740	-11.44930	0.0000
AML?	-0.064593	0.018029	-3.582660	0.0005

Sumber: Eviews 12 (2025), Data Diolah

2. *Fixed Effect Model (FEM)*

Hasil dari estimasi model fixed effect mengenai pengaruh variabel X yang digunakan dalam penelitian terhadap persentase penduduk miskin di Pulau Jawa digambarkan pada tabel berikut. Tabel ini menyajikan nilai koefisien, standar error, nilai t-statistik, serta probabilitas masing-masing variabel independen yang menunjukkan arah dan tingkat signifikansi pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan di enam provinsi di Pulau Jawa selama periode penelitian.

Tabel 5. 8 Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17.39471	2.048230	8.492554	0.0000
KTS?	0.014001	0.011246	1.245011	0.2158
ABH?	2.285947	0.212136	10.77585	0.0000
IPG?	-0.088324	0.021300	-4.146576	0.0001
TPT?	-0.185650	0.078024	-2.379386	0.0191
AML?	-0.009879	0.009210	-1.072543	0.2858

Sumber; Eviews 12 (2025), Data diolah

3. *Random Effect Model (REM)*

Hasil model random effect mengenai pengaruh variabel X yang digunakan dalam penelitian terhadap tingkat kemiskinan digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 5. 9 Hasil Estimasi Random Effect Model (REM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	36.13393	1.715074	21.06844	0.0000
KTS?	-0.027530	0.009941	-2.769498	0.0066
ABH?	1.845235	0.168016	10.98250	0.0000
IPG?	-0.147001	0.019286	-7.621968	0.0000
TPT?	-1.038911	0.043261	-24.01504	0.0000
AML?	-0.064593	0.008596	-7.514671	0.0000

Sumber: Eviews 12 (2025), Data Diolah

5.2.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Proses pengujian spesifikasi model pada regresi data panel bertujuan untuk mengidentifikasi model estimasi yang paling sesuai untuk dianalisis meliputi tiga jenis uji, yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Berdasarkan karakteristik data dan asumsi yang mendasarinya, sehingga hasil estimasi yang diperoleh lebih akurat dalam menjelaskan hubungan antar variabel.

1. Uji Chow

Uji Chow dilakukan sebagai salah satu langkah penting dalam pemilihan model regresi panel yang paling sesuai, yakni untuk menentukan apakah model Fixed Effect Model (FEM) atau Common Effect Model (CEM) yang lebih tepat digunakan. Adapun hasil dari pengujian tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 10 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	78.509823	(5.109)	0.0000
Cross-section Chi-square	183.162439	5	0.0000

Sumber : Eviews 12 (2025), Data Diolah

Berdasarkan output Eviews pada pengujian Redundant Fixed Effects, terlihat bahwa nilai Prob. dari Chi-square menunjukkan angka 0.0000, yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima. Dengan kata lain, model Fixed Effect Model (FEM) lebih sesuai.

2. Uji Hausman

Pada tahapan pengujian ini, dilakukan analisis untuk menentukan model yang paling sesuai. Berikut ini disajikan hasil pengujian yang dilakukan untuk membandingkan kedua model tersebut:

Tabel 5. 11 Uji Hausman

Correlated Random Effect – Hausman			
Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-sq.statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	392.549117	5	0.0000

Sumber: Eviews 12 (2025), Data Diolah

Hasil uji Hausman pada output Eviews menunjukkan nilai probabilitas Chi-Square sebesar 0.0000. Karena nilai tersebut berada di bawah ambang signifikansi 5 persen, maka model yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model.

5.2.2 Hasil Estimasi Model Terpilih Regresi Panel dengan Metode FEM

Berdasarkan hasil uji Chow dan Uji Hausman, model yang paling sesuai dan sering muncul adalah model Fixed Effect Model (FEM). Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) sebagai model utama dalam analisis, karena dianggap mampu menangkap perbedaan karakteristik spesifik tiap provinsi yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen, sehingga hasil estimasi yang diperoleh diharapkan lebih akurat.

Tabel 5. 12 Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM)

Variabel	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
C	17.39471	2.048230	8.492554	0.0000
KTS?	0.014001	0.011246	1.245011	0.2158
ABH?	2.285947	0.212136	10.77585	0.0000
IPG?	-0.088324	0.021300	-4.146576	0.0001
TPT?	-0.185650	0.078024	-2.379386	0.0191
AML?	-0.009879	0.009210	-1.072543	0.2858
Fixed Effects (Cross)				
_BANTEN--C	-3.084421			
_JABAR--C	-0.074534			
_JATENG --C	3.306711			
_JATIM --C	0.089053			
_JKT--C	-4.661721			
_YOGYA-- C	4.424912			

Sumber : Eviews 12 (2025), Data Diolah

Berdasarkan hasil estimasi FEM, dapat diketahui penjelasan masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu penduduk yang memiliki telepon seluler, angka buta huruf, indeks pembangunan gender, tingkat pengangguran terbuka, rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak terhadap persentase penduduk miskin di provinsi- provinsi pulau Jawa dapat dijelaskan model sebagai berikut ini:

$$TKit = \beta_0 + \beta_1 KTSit + \beta_2 ABHit + \beta_3 IPGit + \beta_4 TPTit + \beta_5 AMLit + \epsilon it \dots \dots \dots (5.1)$$

$$Tkit = 17.39471it + 0.014001it + 2.285947it - 0.088324it - 0.185650it - 0.009879it + \epsilon it \dots \dots \dots (5.2)$$

Berdasarkan persamaan model diatas dapat dijelaskan hasil estimasi sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 17.39471, artinya apabila seluruh variabel independen (KTS, ABH, IPG, TPT, AML) bernilai nol, maka persentase penduduk miskin di provinsi-provinsi Pulau Jawa adalah sebesar 17,39 persen.
2. Koefisien regresi sebesar 0.014001 dengan probabilitas 0.2158 (lebih besar dari

0.05), artinya secara statistik variabel kepemilikan telepon seluler tidak signifikan. Namun, secara matematis jika variabel KTS meningkat 1 persen, maka persentase penduduk miskin di Pulau Jawa diperkirakan meningkat sebesar 0,014 persen, dengan asumsi variabel lain tetap.

3. Koefisien regresi sebesar 2.285947 dengan probabilitas 0.0000 (lebih kecil dari 0.05), artinya variabel ABH berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin. Jika ABH meningkat 1 persen, maka persentase penduduk miskin di Pulau Jawa meningkat sebesar 2,29 persen.
4. Koefisien regresi sebesar -0.088324 dengan probabilitas 0.0001 (lebih kecil dari 0.05), artinya variabel IPG berpengaruh signifikan dan negatif terhadap persentase penduduk miskin. Jika IPG meningkat 1 persen, maka persentase penduduk miskin di Pulau Jawa menurun sebesar 0,088 persen.
5. Koefisien regresi sebesar -0.185650 dengan probabilitas 0.0191 (lebih kecil dari 0.05), artinya TPT berpengaruh signifikan dan negatif terhadap persentase penduduk miskin. Jika TPT meningkat 1 persen, maka persentase penduduk miskin menurun sebesar 0,19 persen.
6. Koefisien regresi sebesar -0.009879 dengan probabilitas 0.2858 (lebih besar dari 0.05), artinya variabel AML tidak signifikan. Secara matematis. Jika AML meingkat 1 persen, maka persentase penduduk miskin menurun sebesar 0,01 persen.

Tabel 5. 13 Nilai Konstanta Akhir Provinsi di Pulau Jawa

Variabel	C + Ci
Random Effects (Cross)	
_BANTEN –C	14,3103
_JABAR –C	17,3202
_JATENG –C	20,7014
_JATIM –C	17,4838
_JKT –C	12,733
_YOGYA --C	21,8196

Sumber : Eviewes 12 (2025), Data Diolah

Berikut penejelasan nilai konstanta akhir persamaan model regresi persentase penduduk miskin yang dilihat dari per provinsi di Pulau Jawa sebagai berikut:

1. Konstanta persentase penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta

Nilai konstanta akhir DKI Jakarta sebesar 12,733. Dengan kata lain, jika variabel-variabel seperti akses terhadap telepon seluler, tingkat buta huruf, pembangunan gender, pengangguran terbuka, dan akses air minum layak tidak mengalami perubahan, maka tingkat kemiskinan di DKI Jakarta akan meningkat sebesar 12,733 persen.

2. Konstanta persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat

Nilai konstanta akhir Provinsi Jawa Barat sebesar 17,3202. Artinya, tanpa adanya perubahan pada variabel-variabel bebas, maka persentase penduduk miskin di Jawa Barat akan mengalami peningkatan sebesar 17,3202 persen, dengan asumsi kondisi lainnya tetap konstan.

3. Konstanta persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah

Nilai konstanta akhir Provinsi Jawa Tengah sebesar 20,7014. Artinya, jika seluruh variabel independen tidak mengalami perubahan atau tetap nol, maka persentase penduduk miskin di Jawa Tengah akan meningkat sebesar 20,7014 persen.

4. Konstanta persentase penduduk miskin di Provinsi DI Yogyakarta

Nilai konstanta akhir DI Yogyakarta sebesar 21,8196. Artinya, apabila semua variabel independen tetap atau tidak mengalami peningkatan, maka persentase penduduk miskin di DI Yogyakarta akan meningkat sebesar 21,8196 persen.

5. Konstanta persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur

Nilai konstanta akhir Provinsi Jawa Timur sebesar 17,4838. Hal ini menunjukkan bahwa ketika variabel-variabel independen lain dianggap tidak mengalami perubahan, maka persentase penduduk miskin di provinsi ini akan meningkat sebesar 17,4838 persen.

6. Konstanta persentase penduduk miskin di Provinsi Banten

Nilai konstanta akhir Provinsi Banten sebesar 14,3103. Artinya, tanpa kenaikan atau jika nilai dari variabel persentase penduduk yang memiliki telepon seluler, angka buta huruf, indeks pembangunan gender, tingkat pengangguran terbuka,

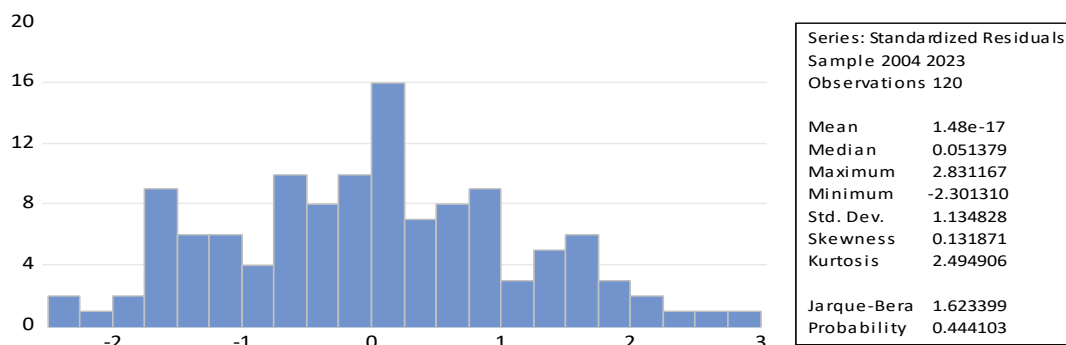
dan persentase penduduk yang menggunakan sumber air minum layak berada pada kondisi tetap atau sama dengan nol, maka persentase penduduk miskin di Provinsi Banten (dianggap konstan) akan meningkat sebesar 14,3103 persen.

5.2.3 Uji Asumsi Klasik

Dalam analisis data panel merupakan kombinasi antara data time series dan data cross section (R. Ajijah, 2011). Maka, uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menilai apakah setiap variabel mengikuti pola distribusi normal. Pengujian dilakukan menggunakan metode Jarque-Bera (JB), di mana jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05 (tingkat signifikansi). Adapun hasil dari uji normalitas ditunjukkan sebagai berikut:



Sumber: Eviews 12 (2025), Data Diolah

Gambar 5. 1 Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji di atas maka hasil yang di dapatkan nilai Jarque – Bera sebesar 1,623399 dengan nilai Prob. Sebesar 0,444103 dimana hasil tersebut lebih besar dari tingkat alpha 0,05 sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak yang artinya residual terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan korelasi antar variabel independen dalam model regresi (Ajijah,2011). Suatu model dikatakan mengalami gejala multikolinearitas apabila nilai korelasi antara variabel-variabel independennya melebihi angka 0,8.

Tabel 5. 14 Hasil Uji Multikolinearitas

	KTS	ABH	IPG	TPT	AML
KTS	1.000000	-0.477473	0.546244	-0.109119	0.284927
ABH	-0.477473	1.000000	-0.695212	0.082850	-0.496234
IPG	0.546244	-0.695212	1.000000	-0.484999	0.733697
TPT	-0.109119	0.082850	-0.484999	1.000000	-0.592614
AML	0.284927	-0.496234	0.733697	-0.592614	1.000000

Sumber: Eviews 12 (2025), Data Diolah

Berdasarkan Tabel 5.19, hasil uji multikolinearitas diperoleh melalui analisis nilai korelasi antar variabel. Nilai koefisien korelasi pada masing-masing variabel tercatat kurang dari 0,8, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi multikolinearitas dalam model yang digunakan dalam penelitian ini.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pada pengujian ini, tujuan utamanya adalah untuk mendeteksi ada atau tidaknya perbedaan varian pada residual antar pengamatan dalam model regresi. Dengan kata lain, uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah varians dari error bersifat homogen atau heterogen di seluruh data yang dianalisis. Apabila nilai probabilitas yang dihasilkan lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varians residual antar pengamatan tidak berbeda secara signifikan, sehingga asumsi homoskedastisitas terpenuhi dan model regresi yang digunakan dianggap layak serta memenuhi salah satu asumsi klasik. Berikut adalah tabel yang berisikan hasil uji heteroskedastisitas.

Tabel 5. 15 Hasil Uji Heterokedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.627000	1.174387	1.385404	0.1688
KTS	0.004590	0.006448	0.711900	0.4780
ABH	-0.050529	0.121632	-0.415423	0.6786
IPG	-0.015385	0.012213	-1.259714	0.2105
TPT	0.025565	0.044736	-.347920	0.7286
AML	0.002841	0.005281	0.537997	0.5917

Sumber: Eviews 12 (2025), Data Diolah

Hasil uji heteroskedastisitas yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 5.11 yang menunjukkan nilai prob. Semua variabel $>$ tingkat alpha (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak terindikasi masalah hereoskedastisitas.

5.2.4 Uji Statistik

Untuk melukan uji hipotesis maka perlu melakukan Uji F, Uji t dan Koefisien Determinasi (R^2).

1. Uji F

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Dengan kata lain, uji ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana seluruh variabel independen dalam model memiliki kemampuan menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen secara simultan, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 5. 16 Hasil Uji Statistik F

R-squared	0.950359	Mean dependent var	10.79633
Adjusted R-squared	0.945805	S.D. Dependent var	5.093423
S.E. of regression	1.185742	Akaike info criterion	3.265804
Sum squared resid	153.2522	Achwarz criterion	3.521324
Log likelihood	-184.9482	Hannan -Quinn criter	3.369571
F-statistic	208.6767	Durbin -Waston stat	1.023192
Prob (F-statistic)	0.000000		

Sumber: Eviews 12 (2025), Data Diolah

Berdasarkan hasil regresi yang ditampilkan, nilai F-statistic sebesar 208,6767 dengan nilai probabilitas (Prob. F-statistic) sebesar 0,000000. Karena nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dinyatakan signifikan secara simultan terhadap persentase penduduk miskin.

2. Uji t

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa pengaruh masing-masing antara variabel bebas dan variabel terikat.

Tabel 5. 17 Hasil Uji Statistik t

Variabel	Coefficient	Sts. Error	t-Statistic	Prob.
C	17.39471	2.048230	8.492554	0.0000
KTS	0.014001	0.011246	1.245011	0.2158
ABH	2.285947	0.212136	10.77585	0.0000
IPG	-0.088324	0.021300	-4.146576	0.0001
TPT	-0.185650	0.078024	-2.379386	0.0191
AML	-0.009879	0.009210	-1.072543	0.2858

Sumber: Eviews 12 (2025), Data Diolah

Uji statistik t digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel menggunakan pendekatan Fixed Effect Model didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Diperoleh bahwa nilai t-statistik untuk variabel KTS adalah sebesar 1.245011, dengan nilai probabilitas sebesar 0.2158. Karena nilai probabilitas ini melebihi batas signifikansi 5 persen ($0.2158 > 0.05$), maka dapat disimpulkan bahwa variabel KTS memiliki pengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap persentase penduduk miskin di wilayah Provinsi-Provinsi Pulau Jawa.
2. Berdasarkan hasil regresi, diperoleh nilai t-statistik variabel ABH sebesar 10,77585 dengan probabilitas 0,0000. Karena nilai probabilitas tersebut lebih kecil daripada tingkat signifikansi 5 persen, maka dapat disimpulkan bahwa ABH berpengaruh signifikan secara positif terhadap persentase penduduk miskin di wilayah Provinsi di Pulau Jawa. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat buta huruf, maka semakin besar jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan.
3. Diketahui bahwa nilai t-statistik variabel IPG sebesar -4.146576 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0001. Karena nilai probabilitas ini lebih kecil dari $\alpha = 5$ persen ($0.0001 < 0.05$), maka dapat disimpulkan bahwa IPG berpengaruh negatif signifikan terhadap persentase penduduk miskin. Artinya, peningkatan IPG dapat membantu menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi pulau Jawa.

4. Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa variabel TPT memiliki nilai t-statistik sebesar -2,379386 dan nilai probabilitas 0,0191. Karena nilai probabilitas ini lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa TPT secara signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa. Dengan kata lain, kenaikan tingkat pengangguran terbuka berkorelasi dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin.
5. Nilai t-statistik untuk variabel AML tercatat sebesar -1.072543, dengan nilai probabilitas 0.2858. Mengingat nilai probabilitas ini lebih besar dari tingkat signifikansi 5 persen, maka variabel AML tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah provinsi-provinsi Pulau Jawa, meskipun arah pengaruhnya negatif.

5.2.5 Koefisien Determinan (R^2)

Hasil estimasi melalui model Fixed Effect (FEM) menunjukkan nilai R-squared sebesar 0,950359. Hal ini berarti bahwa sebesar 95,04 persen perubahan pada variabel persentase penduduk miskin mampu dijelaskan oleh faktor-faktor independen yang tercakup dalam model tersebut yaitu kepemilikan telepon seluler, angka buta huruf, indeks pembangunan gender, tingkat pengangguran terbuka, dan akses sanitasi layak. Sementara itu, sebesar 4,96% variasi sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Nilai Adjusted R-squared yang mencapai 0,945805 menunjukkan bahwa model tersebut telah menyesuaikan diri dengan data secara sangat baik.

5.2.6 Pembahasan

5.2.6.1 Variabel yang paling berkontribusi secara konsisten

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel mana yang paling berperan dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan di setiap provinsi, serta melihat arah dan signifikansi pengaruh dari masing-masing variabel yang dapat digambarkan pada tabel berikut. Dengan adanya analisis ini, diharapkan dapat diketahui faktor-faktor dominan yang memengaruhi tingkat kemiskinan secara lebih terukur, sehingga hasil yang diperoleh tidak hanya memberikan gambaran statistik semata, tetapi juga dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan yang relevan bagi upaya pengentasan kemiskinan di Pulau Jawa pada tabel berikut:

Tabel 5.18 Memperlihatkan variabel yang paling berkontribusi

Provinsi	Variabel yang Signifikan	Arah Pengaruh	Keterangan
DKI Jakarta	Tidak ada yang signifikan	—	Semua variabel tidak signifikan, kemungkinan dipengaruhi karakteristik perkotaan yang kompleks.
Jawa Barat	Kepemilikan Telepon Seluler	Negatif	Meningkatnya kepemilikan HP menurunkan kemiskinan; menunjukkan peran teknologi informasi.
Jawa Tengah	Angka Buta Huruf, Tingkat Pengangguran Terbuka	Positif	Kedua variabel ini meningkatkan kemiskinan, pendidikan rendah dan pengangguran menjadi masalah utama.
DI Yogyakarta	Angka Buta Huruf	Positif	Buta huruf masih memengaruhi kemiskinan meski akses pendidikan relatif tinggi.
Jawa Timur	Kepemilikan Telepon Seluler, Tingkat Pengangguran Terbuka	KTS (-), TPT (+)	Akses telepon seluler menurunkan kemiskinan, tetapi pengangguran meningkatkan kemiskinan.
Banten	Kepemilikan Telepon Seluler	Negatif	Variabel KTS signifikan menurunkan kemiskinan, sedangkan variabel lain tidak berpengaruh nyata.

Sumber: Eviews 12 (2025)

Secara umum, hasil regresi sederhana pada masing-masing provinsi di Pulau Jawa menunjukkan bahwa kontribusi variabel terhadap kemiskinan berbeda-beda sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Di Provinsi DKI Jakarta, tidak ada variabel yang signifikan memengaruhi tingkat kemiskinan. Kondisi ini dapat dimengerti

mengingat Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi dengan struktur sosial yang lebih kompleks, sehingga faktor kemiskinan lebih banyak dipengaruhi oleh aspek kebijakan makro maupun ketimpangan sosial yang tidak tercermin langsung dalam variabel penelitian.

Pada provinsi Jawa Barat kepemilikan telepon seluler menjadi variabel yang signifikan menurunkan kemiskinan. Hal ini menegaskan bahwa akses terhadap teknologi informasi mampu memperkuat kapasitas masyarakat dalam memperoleh pendidikan, informasi, maupun peluang ekonomi digital yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan.

Sementara itu, di Jawa Tengah variabel yang dominan adalah angka buta huruf dan tingkat pengangguran terbuka, keduanya berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Hasil ini mengindikasikan bahwa masalah pendidikan dan keterbatasan lapangan kerja masih menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat Jawa Tengah.

Provinsi DI Yogyakarta, angka buta huruf juga terbukti signifikan meningkatkan kemiskinan. Meskipun daerah ini dikenal sebagai kota pendidikan, kenyataannya masih terdapat kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya memperoleh manfaat pendidikan, sehingga disparitas kualitas pendidikan tetap menjadi faktor penghambat pengentasan kemiskinan.

Jawa Timur hasil yang diperoleh lebih beragam, di mana kepemilikan telepon seluler berkontribusi negatif signifikan terhadap kemiskinan, namun tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif signifikan. Hal ini menggambarkan adanya kontradiksi sosial-ekonomi, di mana pemanfaatan teknologi mampu menekan kemiskinan.

Provinsi Banten, kepemilikan telepon seluler juga menjadi variabel yang signifikan menurunkan kemiskinan. Kondisi ini sejalan dengan hasil di Jawa Barat dan Jawa Timur, yang menegaskan pentingnya literasi digital dan akses teknologi bagi rumah tangga miskin.

Secara keseluruhan, pola yang terlihat adalah bahwa kepemilikan telepon seluler konsisten berperan menurunkan kemiskinan di beberapa provinsi, sementara angka buta huruf dan tingkat pengangguran terbuka justru meningkatkan

kemiskinan terutama di Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Indeks pembangunan gender serta akses air minum layak pada regresi sederhana tidak menunjukkan pengaruh signifikan di sebagian besar provinsi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor pendidikan, teknologi, dan ketenagakerjaan menjadi variabel kunci yang paling menentukan dalam dinamika kemiskinan di Pulau Jawa.

5.2.6.2 Pengaruh Penduduk yang Memiliki Telepon Seluler terhadap Persentase penduduk miskin

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel penduduk yang memiliki atau menguasai telepon seluler memberikan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap persentase penduduk miskin di Pulau Jawa. Artinya, peningkatan kepemilikan telepon seluler belum terbukti secara nyata mampu menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah ini. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan teknologi komunikasi belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai alat produktif untuk mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin. Hasil ini juga selaras dengan penelitian Samuel Musungwini (2018) dalam studi mengenai petani kecil di Zimbabwe, yang menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar rumah tangga telah memiliki telepon seluler, penggunaannya masih terbatas pada fungsi komunikasi dasar.

Hal serupa kemungkinan terjadi di beberapa provinsi di Pulau Jawa, di mana telepon seluler lebih dominan digunakan untuk keperluan sosial, hiburan, atau komunikasi personal, bukan sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan telepon seluler saja tidak cukup untuk menurunkan angka kemiskinan secara langsung tanpa disertai dengan kemampuan dan pengetahuan dalam memanfaatkannya untuk kegiatan ekonomi yang bernilai tambah.

5.2.6.2 Pengaruh Angka Buta Huruf terhadap Persentase Penduduk Miskin

Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan bahwa angka buta huruf memiliki pengaruh positif terhadap persentase penduduk miskin di provinsi-provinsi yang berada di Pulau Jawa. Artinya, semakin tinggi angka buta huruf, maka semakin besar pula persentase masyarakat yang berada dalam kondisi kemiskinan. Temuan

ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dasar, terutama kemampuan membaca dan menulis, menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ketidakmampuan individu dalam mengakses informasi dan peluang ekonomi karena keterbatasan literasi berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas dan kesempatan kerja yang layak.

Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian Moya et al. (2024) yang menunjukkan bahwa angka buta huruf memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kemiskinan. Dalam penelitiannya, Moya dan tim menemukan bahwa buta huruf memberikan kontribusi sebesar 26 persen terhadap peningkatan angka kemiskinan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dasar dan pemberantasan buta huruf sebagai langkah strategis dalam upaya penanggulangan kemiskinan, khususnya di wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi seperti beberapa provinsi di Pulau Jawa.

Peningkatan kemampuan literasi dasar tidak hanya berimplikasi pada penurunan tingkat kemiskinan, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat kapasitas individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi modern. Dalam konteks pembangunan di Pulau Jawa yang semakin berorientasi pada sektor jasa dan industri kreatif. Program pemberantasan buta huruf yang terintegrasi dengan pelatihan keterampilan dasar dan kewirausahaan juga menjadi langkah strategis untuk menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan mandiri secara ekonomi.

5.2.6.3 Pengaruh Indeks Pembangunan Gender Terhadap Persentase Penduduk Miskin di Provinsi-provinsi Pulau Jawa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa Indeks Pembangunan Gender memiliki pengaruh signifikan dan bersifat negatif terhadap persentase penduduk miskin. Indeks pembangunan gender yang tinggi mencerminkan adanya kesetaraan gender dalam berbagai aspek pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi, yang dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wahab (2023) hal ini mengindikasikan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan jika dilihat dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi. Dengan

demikian, peningkatan indeks pembangunan gender menjadi salah satu strategi penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

Pada hasil penelitian tersebut diperkuat penelitian yang dilakukan oleh Prastyorini (2025) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan gender berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan nilai koefisien jalur sebesar -0.094 dan P-Value 0.020. Artinya, semakin tinggi IPG suatu daerah, maka semakin rendah persentase penduduk miskinnya. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesetaraan gender, khususnya dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi, mampu memberikan kontribusi nyata dalam pengurangan angka kemiskinan.

Perempuan yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi cenderung mampu meningkatkan kondisi sosial ekonomi rumah tangganya. Dengan demikian, pembangunan yang berpihak pada kesetaraan gender bukan hanya meningkatkan kualitas hidup perempuan, tetapi juga mendorong penurunan tingkat kemiskinan secara keseluruhan. Dalam hal ini, tidak semua penelitian yang dilakukan sama hasilnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Putra (2024) dengan hasil yang didapat adalah indeks pembangunan gender berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan.

5.2.6.4 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Persentase Penduduk Miskin di provinsi-provinsi Pulau Jawa

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin. Dimana hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Maya Ningsih et al. (2023) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Temuan tersebut menyiratkan bahwa peningkatan jumlah pengangguran tidak selalu berbanding lurus dengan naiknya angka kemiskinan. Dalam konteks ini, dapat dijelaskan bahwa tidak semua individu yang masuk dalam kategori pengangguran tergolong sebagai masyarakat miskin.

Untuk mendukung hal tersebut, adapun penelitian yang dilakukan oleh Utami (2018) dimana dalam penelitian ini terdapat hasil bahwa tingkat pengangguran

pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Artinya, peningkatan TPT justru disertai dengan penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pengangguran berada dalam kondisi miskin, karena sebagian berasal dari kalangan terdidik atau sedang dalam masa transisi menuju dunia kerja. Temuan ini menunjukkan bahwa pengangguran di Jawa Timur heterogen, sehingga tidak seluruhnya berdampak langsung terhadap peningkatan angka kemiskinan.

Selain itu, penelitian yang dilakukan Mohini (2022) menyimpulkan bahwa hasil regresi dalam penemuan dalam studi ini memperlihatkan bahwa variabel pengangguran terbuka memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan jumlah penduduk miskin di wilayah Jawa Timur. Dengan kata lain, setiap kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1 persen justru diikuti oleh penurunan jumlah penduduk miskin, yakni sebesar 1.569.148 jiwa. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pengangguran tidak selalu identik dengan bertambahnya angka kemiskinan.

5.2.6.5 Pengaruh Rumah Tangga yang Menggunakan sumber Air Minum Layak Terhadap Persentase Penduduk Miskin di Provinsi-provinsi Pulau Jawa

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi-provinsi Pulau Jawa. Pada pernyataan hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri et al., 2025) dalam penelitian ini, hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa variabel akses air minum layak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Koefisien regresi sebesar -0.05784 menunjukkan bahwa peningkatan akses terhadap air minum layak sebesar 1% diperkirakan akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0.05784 persen, dengan asumsi variabel-variabel lainnya dalam model tetap.

Temuan ini mencerminkan bahwa kemudahan dalam memperoleh air minum yang aman dan layak dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, khususnya dalam aspek kesehatan dan produktivitas. Akses air minum yang memadai dapat menurunkan risiko penyakit sehingga meningkatkan kualitas hidup.

Dengan demikian, peningkatan cakupan layanan air minum layak menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

5.2 Implikasi Kebijakan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan dua pendekatan analisis, yaitu regresi sederhana pada tiap provinsi di Pulau Jawa dan regresi data panel dengan model Fixed Effect, memberikan perbandingan yang cukup menarik untuk dipertimbangkan baik secara akademik maupun praktis. Pada regresi sederhana, analisis dilakukan secara terpisah per provinsi sehingga pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap tingkat kemiskinan dapat terlihat secara lebih spesifik sesuai kondisi lokal. Misalnya, di Provinsi Banten kepemilikan telepon seluler terbukti paling dominan berperan dalam menurunkan angka kemiskinan, sedangkan di Jawa Tengah faktor angka buta huruf menjadi penyebab utama tingginya kemiskinan. Hasil serupa juga tampak di DKI Jakarta, di mana Indeks Pembangunan Gender menjadi variabel yang paling memengaruhi penurunan kemiskinan, sementara di Jawa Timur justru tingkat pengangguran terbuka yang paling berkontribusi terhadap meningkatnya kemiskinan. Pendekatan regresi sederhana ini memberikan gambaran yang lebih kontekstual karena dapat mengungkap faktor dominan sesuai dengan karakteristik masing-masing provinsi.

Secara keseluruhan, hasil regresi sederhana ini memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan berbasis karakteristik wilayah masing-masing. Meskipun secara umum faktor pendidikan, kesetaraan gender, dan infrastruktur dasar terbukti penting, pendekatan kebijakan tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi unik di setiap provinsi. pemerintah perlu menyusun kebijakan yang terfokus dan adaptif terhadap kondisi lokal masing-masing provinsi di Pulau Jawa. Pemerintah daerah perlu memperluas akses pendidikan dasar dan keaksaraan, terutama di wilayah dengan tingkat buta huruf yang tinggi, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu, regresi data panel dengan model Fixed Effect memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana variabel-variabel independen memengaruhi tingkat kemiskinan secara simultan di seluruh provinsi dan periode penelitian. Hasil data panel menunjukkan bahwa secara umum angka buta huruf

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang berarti semakin tinggi angka buta huruf maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan di Pulau Jawa. Sebaliknya, Indeks Pembangunan Gender, kepemilikan telepon seluler, dan akses air minum layak cenderung berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, menandakan bahwa peningkatan pada ketiga variabel ini dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Variabel tingkat pengangguran terbuka secara konsisten menunjukkan hubungan positif terhadap kemiskinan, meskipun pada beberapa provinsi hasil regresi sederhana menunjukkan anomali. Perbedaan antara regresi sederhana dan data panel ini menegaskan bahwa analisis per provinsi memang menonjolkan faktor lokal, namun secara agregat pola besar tetap mengikuti teori ekonomi pembangunan bahwa pendidikan, akses teknologi, kesetaraan gender, dan infrastruktur dasar berperan penting dalam mengurangi kemiskinan.

Jika dibandingkan dengan teori dan hasil penelitian sebelumnya, temuan ini sebagian besar konsisten. Teori human capital menyatakan bahwa pendidikan merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi kemiskinan (Todaro & Smith, 2015). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian di mana angka buta huruf terbukti meningkatkan tingkat kemiskinan, baik pada analisis sederhana maupun panel. Penelitian empiris oleh Nengsih et al. (2023) juga menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi, selaras dengan hasil penelitian ini. Temuan terkait Indeks Pembangunan Gender juga sejalan dengan penelitian Prastyorini (2025) yang menegaskan bahwa pembangunan manusia dan gender berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Demikian pula, hasil bahwa akses air minum layak menurunkan kemiskinan sesuai dengan penelitian Putra et al. (2016) yang menemukan bahwa akses air bersih berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin. Namun, terdapat beberapa hasil yang kurang sesuai dengan teori, misalnya pada kasus di Jakarta di mana peningkatan pengangguran tidak selalu diikuti peningkatan kemiskinan. Hal ini dapat dijelaskan melalui kondisi struktural ekonomi perkotaan, di mana sebagian besar penduduk miskin memiliki akses terhadap kegiatan sektor informal sehingga masih dapat bertahan meskipun angka pengangguran meningkat.

Dari perspektif kebijakan, hasil penelitian ini memiliki implikasi yang sangat penting. Pertama, karena hasil regresi sederhana menunjukkan variasi antar provinsi, maka kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu bersifat spesifik lokal (place-based policy). Misalnya, di provinsi dengan angka buta huruf tinggi seperti Jawa Tengah, program pemberantasan buta huruf dan peningkatan kualitas pendidikan dasar harus menjadi prioritas utama. Sementara itu, di provinsi seperti Banten, kebijakan yang mendorong pemanfaatan teknologi digital, literasi informasi, serta akses telekomunikasi dapat lebih efektif dalam menekan angka kemiskinan. Kedua, berdasarkan hasil data panel, pemerintah pusat dan daerah perlu menaruh perhatian pada faktor struktural yang berlaku secara umum di seluruh Pulau Jawa, seperti penurunan pengangguran terbuka, peningkatan kesetaraan gender, perluasan akses air minum layak, serta peningkatan pemanfaatan teknologi digital. Strategi ini dapat dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja padat karya, program vokasional berbasis kebutuhan industri, pengarusutamaan gender dalam kebijakan pembangunan, serta pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan air bersih.

Kebijakan lain yang dapat ditarik adalah perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat dapat berperan dalam menyiapkan kebijakan makro, misalnya melalui regulasi ketenagakerjaan, penyediaan infrastruktur dasar, dan program nasional untuk kesetaraan gender. Sedangkan pemerintah daerah dapat lebih fokus pada konteks lokal, misalnya mengembangkan program literasi digital bagi masyarakat miskin di Banten atau memperkuat sektor pertanian dan industri padat karya di Jawa Timur. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta juga penting, terutama dalam hal pengembangan UMKM, penyediaan modal usaha, dan investasi pada teknologi yang mampu memberdayakan masyarakat miskin. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi teori dan empiris terdahulu, tetapi juga memperkuat urgensi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang terintegrasi antara skala lokal dan nasional.

Secara keseluruhan, perbandingan antara regresi sederhana dan regresi data panel menunjukkan bahwa pendekatan mikro dan makro perlu digabungkan dalam memahami masalah kemiskinan. Regresi sederhana mampu mengidentifikasi

faktor-faktor spesifik provinsi yang dapat dijadikan prioritas intervensi daerah, sementara regresi data panel memberikan gambaran umum yang lebih stabil mengenai faktor-faktor struktural yang memengaruhi kemiskinan di Pulau Jawa. Konsistensi hasil dengan teori human capital, teori pembangunan gender, serta penelitian empiris terdahulu memperkuat validitas temuan ini. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah perlu diarahkan pada kombinasi antara program peningkatan kualitas pendidikan, pengentasan pengangguran, pengarusutamaan gender, penguatan infrastruktur dasar, serta akselerasi literasi teknologi. Upaya yang terintegrasi tersebut diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dan berkelanjutan di Pulau Jawa, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang menargetkan penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya.

kebijakan di lapangan sering menghadapi tantangan. Misalnya, kebijakan penurunan angka buta huruf memerlukan tidak hanya penyediaan fasilitas pendidikan, tetapi juga pendekatan budaya dan sosial. Banyak masyarakat miskin di Jawa Tengah atau Jawa Timur yang masih menganggap pendidikan tidak terlalu penting dibandingkan bekerja sejak usia muda, sehingga intervensi pemerintah harus menyasar perubahan pola pikir masyarakat, bukan hanya penyediaan sarana belajar. Begitu pula dalam konteks kesetaraan gender, meskipun hasil empiris menunjukkan peningkatan Indeks Pembangunan Gender mampu menekan angka kemiskinan, hambatan berupa diskriminasi di pasar kerja dan minimnya representasi perempuan dalam sektor formal masih menjadi masalah yang kompleks. Kebijakan yang hanya berfokus pada peningkatan indikator angka tanpa memperhatikan hambatan sosial dan budaya berisiko tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan.

Dalam hal pengangguran, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka masih berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Namun, tidak semua provinsi menunjukkan korelasi linier ini. Contoh di DKI Jakarta mengindikasikan bahwa tingginya aktivitas sektor informal mampu menahan lonjakan kemiskinan meskipun pengangguran terbuka meningkat. Temuan ini memberikan implikasi bahwa kebijakan penurunan pengangguran sebaiknya tidak

hanya berfokus pada penciptaan lapangan kerja formal, tetapi juga pada pemberdayaan sektor informal agar lebih produktif, terlindungi, dan mampu memberikan penghasilan layak. Program seperti kredit mikro, pelatihan kewirausahaan, serta legalisasi dan perlindungan usaha kecil bisa menjadi langkah strategis. Dengan demikian, kebijakan ketenagakerjaan yang berbasis pada karakteristik masing-masing provinsi dapat menjadi instrumen penting dalam mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

Aspek lain yang penting adalah akses terhadap air minum layak. Walaupun hampir seluruh provinsi di Pulau Jawa telah mencapai angka di atas 90 persen, hasil penelitian ini tetap menegaskan bahwa akses air bersih masih berkontribusi signifikan dalam menekan angka kemiskinan. Artinya, kualitas dan keberlanjutan layanan lebih penting dibanding sekadar capaian angka. Kebijakan pemerintah perlu diarahkan pada pembangunan infrastruktur air minum yang tidak hanya terjangkau tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan. Di sisi lain, pemerintah daerah harus mampu memastikan distribusi yang merata ke wilayah-wilayah pinggiran dan pedesaan yang sering kali tertinggal dibandingkan wilayah perkotaan. Hal ini sejalan dengan studi Putra et al. (2016) yang menunjukkan bahwa akses air bersih merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin. Dengan demikian, prioritas pembangunan infrastruktur dasar tetap menjadi pilar penting dalam strategi pengentasan kemiskinan.

Dari sudut pandang akademis, penelitian ini juga menegaskan pentingnya penggunaan dua pendekatan analisis secara bersamaan. Regresi sederhana memberikan gambaran mikro yang mendalam tentang setiap provinsi, sedangkan regresi data panel menyajikan gambaran makro yang komprehensif. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa fenomena kemiskinan tidak bisa dilihat hanya dari satu sudut pandang. Oleh karena itu, penelitian-penelitian berikutnya disarankan untuk mengombinasikan berbagai metode analisis lain, misalnya menggunakan model dinamis atau memasukkan variabel tambahan seperti tingkat inflasi, ketimpangan pendapatan, atau migrasi penduduk, yang mungkin juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian ini menggaris bawahi bahwa penanggulangan kemiskinan di Pulau Jawa harus didekati melalui strategi multidimensi. Peningkatan kualitas pendidikan untuk menekan angka buta huruf, penguatan kebijakan kesetaraan gender untuk memperluas kesempatan kerja, penciptaan lapangan kerja yang inklusif bagi tenaga kerja formal dan informal, serta pembangunan infrastruktur dasar khususnya akses air bersih. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi sangat krusial agar kebijakan tidak berhenti pada level dokumen, melainkan benar-benar terimplementasi di lapangan.

Secara umum, penting bagi pemerintah pusat untuk mendorong pemerataan akses terhadap teknologi dan air bersih, serta mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan pembangunan. Kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang bersifat kompleks dan saling terkait antar variabel. Dengan demikian, upaya yang bisa dilakukan akan memberikan arah kebijakan yang jelas bahwa penanggulangan kemiskinan di Pulau Jawa. pemerintah daerah di Pulau Jawa perlu fokus pada peningkatan kualitas pendidikan untuk menurunkan angka buta huruf, mendorong kesetaraan gender guna meningkatkan Indeks Pembangunan Gender, serta memperluas kesempatan kerja untuk menekan tingkat pengangguran terbuka. Ketiga hal tersebut terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

Kebijakan pemerintah yang dapat diterapkan dari hasil penelitian ini adalah mengindikasikan bahwa strategi pengentasan kemiskinan di Pulau Jawa perlu diarahkan pada integrasi program nasional dengan kebutuhan daerah. Pemerintah pusat dapat memperkuat program nasional seperti *Kartu Indonesia Pintar* (KIP), *Program Keluarga Harapan* (PKH), serta *Bantuan Pangan Non-Tunai* (BPNT) yang terbukti membantu rumah tangga miskin memenuhi kebutuhan dasar. Namun, program tersebut perlu dilengkapi dengan kebijakan daerah yang lebih kontekstual, misalnya peningkatan literasi digital di Banten, pemberantasan buta huruf di Jawa Tengah, atau program padat karya di Jawa Timur untuk menekan pengangguran.